

Koordinasi Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Ketapang

Oleh:

Nindya Aura Salsabila,

Nama Dosen Pembimbing:

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si.

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan fisik desa yang mencakup infrastruktur seperti jalan, drainase, irigasi, serta fasilitas umum lainnya.

Di Desa Ketapang, pembangunan fisik tahun 2023–2024 dilaksanakan melalui sistem swakelola dengan melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah desa, BPD, TPK, dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam aspek koordinasi antar stakeholder, sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian target pembangunan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Pertama, kesenjangan komunikasi, yang terlihat dari perubahan jadwal dan keterlambatan pelaksanaan, seperti material datang saat petugas penerima tidak berada di lokasi sehingga proses pekerjaan tertunda.
- Kedua, kesenjangan dalam pembagian kerja dan kemampuan teknis, karena keterampilan warga sebagai pelaksana swakelola belum merata, sehingga beberapa pekerjaan harus diperbaiki ulang dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian.
- Ketiga, Kurangnya kedisiplinan dan kesatuan tindakan terlihat dari ketidakhadiran sebagian stakeholder dalam evaluasi, sehingga keputusan tidak dijalankan secara konsisten dan beberapa kegiatan tertunda ke tahun berikutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan pembangunan fisik dan koordinasi antar stakeholder di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, TPK, RT/RW, serta masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ketapang tahun 2023–2024 telah berjalan cukup baik. Sebanyak 50% program pembangunan telah terlaksana secara optimal dengan capaian 100%, seperti pembangunan jalan desa, polindes, rumah tidak layak huni, dan lampu PJU. Namun, 50% program lainnya belum sepenuhnya mencapai target dengan realisasi sekitar 80–90%, seperti pembangunan drainase, balai desa, dan sarana pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antara stakeholder.

Pembahasan

Berdasarkan teori koordinasi Hasibuan (2014), efektivitas koordinasi dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi, kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan optimal karena masih terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan miskomunikasi antar pihak. Kesatuan tindakan juga belum merata karena tidak semua stakeholder hadir dalam forum musyawarah. Selain itu, pembagian kerja belum sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan teknis masyarakat, sehingga beberapa pekerjaan harus diperbaiki ulang. Sementara itu, disiplin sudah cukup baik, namun masih belum konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi dalam pembangunan fisik desa sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama terletak pada komunikasi yang tidak tepat waktu, rendahnya kehadiran stakeholder dalam forum koordinasi, serta keterbatasan kemampuan teknis masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dampak dari kondisi tersebut adalah terjadinya keterlambatan pekerjaan, adanya perbaikan ulang, serta belum tercapainya target pembangunan secara maksimal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori koordinasi Hasibuan dalam konteks pembangunan desa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi serta pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa.

Referensi

- S. I. Paru Selni, Kaunang Markus, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu,” *J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–11, 2019.
- A. D. Amalia and M. Syawie, “Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi,” *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 2, pp. 175–188, 2016, doi: 10.33007/inf.v1i2.146.
- I. Abdurrohimi et al., “Kinerja tenaga pendamping lokal desa dalam pembangunan fisik di desa selacai kecamatan cipaku kabupaten ciamis,” pp. 1808–1822, 2019.
- M. Z. Zam, “Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan,” *J. Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 1, pp. 285–299, 2025, doi: 10.56338/jks.v8i1.6707.
- K. ENDAH, “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kiki,” *J. Ilm. Adm. negara*, vol. Vol 5 No 1, no. 150, p. 76, 2018.
- M. K. Insan and I. F. Agustina, “Building Collaboration as a Village Independence Ecosystem in Ketapang Village Tanggulangin District Sidoarjo Regency [Membangun Kolaborasi Sebagai Ekosistem Kemandirian Desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten,” pp. 1–11.
- I. Rodiyah and J. Irianto, “Stakeholder-based governance for managing victims of violence against women and children in East Java,” *Masyarakat, Kebud. dan Polit.*, vol. 37, no. 1, pp. 60–73, 2024, doi: 10.20473/mkp.v37i12024.60-73

Referensi

L. Apriyani and D. B. Arif, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah,” *J. Citizsh. Media Publ. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 61, 2019, doi: 10.12928/citizenship.v2i2.17991.

M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *HUMANIKA*, vol. 21, no. 1, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. P. Spradley and M. Huberman, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif,” *J. Manag. Account. Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.

Z. N. R. Yuliana Nina, “169-174,” *Peran Komun. yang Ef. sebagai Kunci menuju Kesuksesan Seorang Putri Juniawan. Socius J. Penelit. Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 1, no. December, pp. 169–174, 2023.

K. Gorontalo, “Koordinasi Kepala,” vol. III, pp. 52–59, 2016.

P. Rizky, Akbar, “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa,” p. 20, 2020.

Ayu and Saipul, “The Community Participation in Infrastructure Development in Penda Muntei Village , Kapuas Tengah Subdistrict , Kapuas Regency,” *Indones. J. Public Adm. Gov.*, vol. 1, no. 2, 2024, doi: 10.70074/ijpag.v1i1.

O. Madila, W. Waworundeng, and A. Kimbal, “KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud),” *J. Eksek.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–12, 2019.

